

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Masyarakat (humas) merupakan kelembagaan atau fungsi pelayanan publik yang diperlukan oleh setiap instansi. Humas mengambil bagian penting dalam proses penetapan kebijakan. Baik instansi yang bersifat komersial maupun non komersial perlu mengedepankan fungsi dan peran humas. Selain itu, humas juga berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan semua orang, agar instansi dapat memperoleh kepercayaan dari publiknya. Pelayanan yang baik di setiap instansi sangat penting diperhatikan demi terciptanya pengertian dan hubungan yang baik dengan masyarakat luas.

Peran humas semakin penting di era reformasi ini. Humas dapat membawa perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat, khususnya aspek kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi yang selama ini dibatasi. Masyarakat secara terbuka berani beropini terhadap kebijakan pemerintah ataupun pelayanan pemerintah yang dirasa tidak sesuai dengan harapan mereka secara langsung ataupun melalui media. Humas juga berfungsi untuk menginformasikan ke setiap bagian tentang apa yang tengah terjadi dalam organisasi termasuk organisasi pemerintah dan tindakan apa saja yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Peran humas juga sangat penting untuk percepatan penyampaian informasi. Hal ini mengingat peran humas sebagai pengatur gerak informasi sangat diperlukan. Humas diharapkan dapat membantu terjalinnya komunikasi yang baik antara instansi yang bersangkutan dengan masyarakat dan pihak - pihak terkait lainnya.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada ayat 1, ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur penyelenggaraan daerah, bersama Walikota Padang. Sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah DPRD mempunyai tiga fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi yaitu membuat produk hukum dalam bentuk peraturan daerah. Fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran yaitu membahas RAPBD bersama SKPD untuk menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) APBD. Sedangkan yang ketiga adalah fungsi pengawasan yaitu mengawasi seluruh perda-perda yang masih berlaku termasuk perda mengenai APBD ini sendiri. Untuk melaksanakan fungsi ini DPRD memiliki wewenang. Sekretariat DPRD diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan tiga fungsi dan wewenang tersebut. Salah satu unit kerja yang ada di sumber DPRD, Sekretariat DPRD ini terdiri dari empat bagian (Administrasi, Riset dan Perundang-undangan, Keuangan, Humas). Salah satu unit peranan dalam mempublikasikan kegiatan dan kinerja DPRD.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, berdasarkan hasil observasi / pengamatan dan realita yang ada melalui berbagai media, baik itu media sosial (Facebook / Twitter) ataupun media cetak melalui surat kabar harian dan mingguan ataupun melalui media elektronik, ternyata kegiatan dan kinerja DPRD selama ini masih belum semuanya terpublikasikan dengan baik sehingga warga Kota Padang tidak mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan oleh DPRD sesuai tiga fungsi dan tugas wewenangnya itu. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh bagian humas belum melaksanakan tugas pokok dengan baik, bagian humas kurang efektif untuk mempublikasikan kegiatan dan kinerja DPRD ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul **”Tinjauan Peran dan Aktifitas Humas dalam Pelaksanaan Kegiatan Rutin untuk Peningkatan Kinerja DPRD Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

DPRD Kota Padang adalah lembaga kedaulatan rakyat yang menerima segala aspirasi rakyat. Mengingat pentingnya peran DPRD di tengah-tengah masyarakat kota Padang, dibutuhkan suatu divisi yang mengatur hubungan antara pejabat yang menjalani tugas di kantor daerah perwakilan rakyat ini dengan masyarakat. Divisi humas tersebut didukung oleh beberapa aktifitas, sebagai berikut : Protokoler, Dokumentasi, Perpustakaan, dan Pengelolaan Informasi.

Oleh karena itu penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan humas di kantor DPRD Kota Padang
2. Bagaimana aktifitas humas dalam penyelenggaraan kegiatan kegiatan di kantor DPRD Kota Padang

1.3 Tujuan PKL

Kegiatan magang merupakan suatu bentuk praktek kerja yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memantapkan keprofesian pada suatu bidang ilmu tertentu. Adapun tujuan dilaksanakannya magang di kantor DPRD Kota Padang antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan humas di dalam kantor DPRD kota Padang
2. Untuk mengetahui bagaimana aktifitas humas dalam penyelenggaraan kegiatan kegiatan di kantor DPRD Kota Padang.

1.4 Manfaat PKL

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil kerja praktek ini, adalah :

A. Bagi Penulis

1. Mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kemampuan mencari informasi serta belajar memecahkan masalah berdasarkan ilmu yang dimiliki.
2. Dapat mempelajari peran humas dan aktifitas di kantor DPRD Kota Padang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta wawasan.
3. Dengan adanya Praktek Lapangan, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja secara tepat guna.

B. Bagi Kantor DPRD kota Padang

1. Mendapatkan bantuan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memperlancar kegiatan organisasi
2. Dengan adanya mahasiswa praktek kerja lapangan, dapat membantu dan mempermudah staff DPRD Kota Padang dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. Laporan kegiatan praktek kerja lapangan yang diberikan oleh mahasiswa, dapat menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan perbaikan diri, terkait dengan kegiatan dan peranan humas di dalam organisasi tersebut.

C. Bagi Pembaca

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pembaca mengenai peranan dan aktifitas di DPRD Kota Padang.

1.5 Tempat dan Waktu PKL

Kantor DPRD Kota Padang dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. Praktek kerja lapangan ini akan dilaksanakan selama 40 hari kerja, yaitu dari tanggal 3 Januari sampai dengan 24 Februari 2017.

1.6 Sistematika Penulis

Agar dapat memperoleh laporan ini maka penulis menyusun sistematika, Laporan Tugas Akhir dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

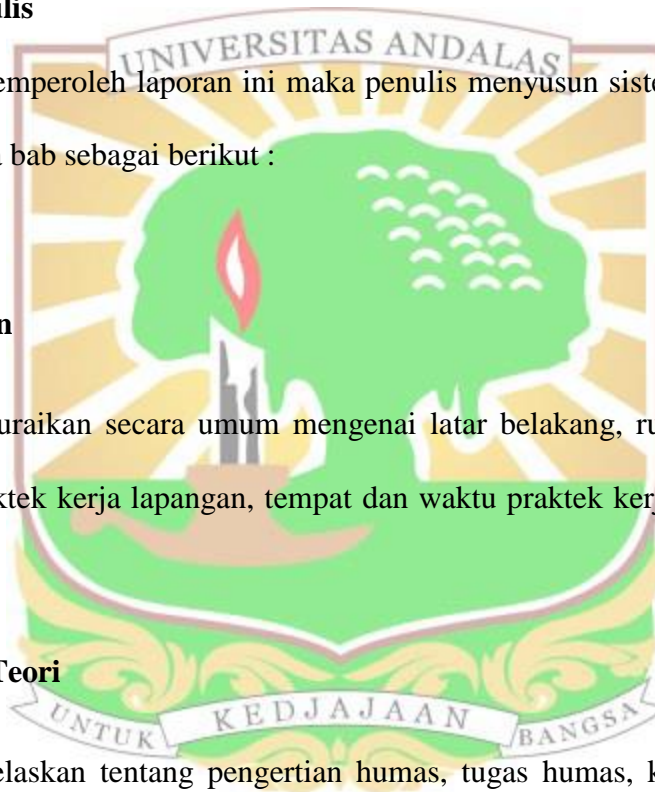
Bab ini menguraikan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat praktek kerja lapangan, tempat dan waktu praktek kerja lapangan, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang pengertian humas, tugas humas, kegiatan humas, beserta fungsi dari humas tersebut.

BAB III : Gambaran Umum atau Profil DPRD

Gambaran umum Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang berisikan sejarah berdirinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, visi dan misi, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktivitas kantor.



BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisikan laporan praktek kerja lapangan yang telah dilakukan selama kegiatan magang berlangsung.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan.

